



AKUNTABILITAS PADA ORGANISASI BERORIENTASI NONLABA GEREJA DI MASA PANDEMI

Maria¹ A.A.N. Bagus Dwirandra² I Ketut Sujana³ I Ketut Budiarta⁴

Article history:

Submitted: 16 Januari 2022

Revised: 26 Januari 2022

Accepted: 2 Februari 2022

Keywords:

Church accountability;
Theory planned of behavior;
Phenomenology;
Interpretative
phenomenological analysis;

Kata Kunci:

Akuntabilitas gereja;
Theory planned of behavior;
Fenomenologi;
Interpretative
phenomenological analysis;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
mariaboedyo@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the phenomenon of the COVID-19 pandemic that hit all sectors of society, including the church as a religious organization where in 2020 the government issued an appeal for people to carry out activities at home, including worshipping from home. This has had an impact on the implementation of the Bethlehem Untal-Untal GKPB program, especially in terms of utilizing the program budget. The purpose of this study is to articulate the essences of the application of church accountability during the COVID-19 pandemic. This type of research is a qualitative research with a phenomenological approach. The qualitative data analysis technique used in this study used the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method. Data was collected using in-depth interviews, observation and documentation methods. The results of the study found three themes that emerged in the meaning of informants, namely: positive attitudes, subjective norms, and perception of behavioral control which became the motivating factor for informants in making decisions over budget allocations as the application of church accountability during the pandemic.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh sektor masyarakat tak terkecuali gereja sebagai organisasi keagamaan dimana pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan himbauan agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah saja, termasuk pula beribadah dari rumah. Hal itu membawa dampak bagi pelaksanaan program GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal terutama dalam hal pemanfaatan anggaran program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengartikulasikan esensi-esensi makna penerapan akuntabilitas gereja dalam masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan tiga tema yang muncul dalam pemaknaan informan, yaitu: sikap positif, norma subjektif; dan persepsi kontrol perilaku yang menjadi faktor pendorong informan dalam mengambil keputusan alokasi anggaran sebagai penerapan akuntabilitas gereja di masa pandemi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia²

Email: mariaboedyo@gmail.com

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola organisasi yang menjadi perhatian penting bagi entitas, baik yang berorientasi laba maupun entitas berorientasi nonlaba. Sebagaimana yang dijelaskan pada ISAK 35 dari PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dimana perbedaan mendasar dari entitas yang berorientasi laba dan non laba erat kaitannya dengan cara memperoleh sumber daya entitas. Bagi perusahaan yang berorientasi non laba menjalankan aktivitas operasionalnya menggunakan sumber daya yang diperoleh dari donatur yang tentunya tidak mengharapkan timbal balik secara ekonomi. Oleh sebab itu, akuntabilitas sangat berperan disini terutama untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang diberikan apakah telah dikelola dengan baik oleh manajemen yang ditunjukkan dari laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan entitas.

Gereja merupakan salah satu bentuk entitas berorientasi nonlaba dalam bidang keagamaan yang berbadan hukum. Gereja disebut sebagai badan hukum karena memenuhi syarat yaitu memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki pengurus dan anggota (jemaat) serta mempunyai usaha untuk tujuan tertentu yaitu keagamaan, untuk itulah gereja harus memperhatikan tata kelolanya. Salah satu unsur tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi adalah akuntabilitas. Penatalayan gereja wajib memenuhi tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan gereja serta pembangunan jemaat. Sumber penerimaan keuangan gereja berasal dari persembahan maupun sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari jemaat gereja serta pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, jemaat serta donatur dapat diibaratkan sebagai pemilik modal yang menginvestasikan keuangan mereka melalui persembahan, sumbangan serta bentuk lainnya dalam mendukung program serta kegiatan pelayanan jemaat, sedangkan penatalayan gereja diibaratkan seperti manajemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Akuntabilitas dalam gereja diperlukan untuk memberi keyakinan kepada warga jemaat, bahwa apa yang telah mereka persembahkan kepada Tuhan melalui gereja telah digunakan dan dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab penatalayan gereja.

Tata kelola yang baik terhadap keuangan jemaat atau gereja akan membawa manfaat yang besar bagi warga jemaat sebagai representasi dari kehendak Tuhan. Penelitian Munte & Dongoran (2019) pada jemaat HKBP Bandar Khalipah menghasilkan kesimpulan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat jemaat untuk memberikan sumbangan kepada gereja. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gereja meliputi penyusunan informasi keuangan kepada jemaat HKBP Bandar Khalipah agar jemaat dapat menilai pertanggungjawaban pengurus gereja atas segala kegiatan yang dilakukan. Laporan keuangan menjadi salah satu alat pertanggungjawaban bendahara gereja atas keuangan gereja. Minat jemaat HKBP Bandar Khalipah untuk berdonasi ke gereja dilatarbelakangi oleh akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik oleh bendahara gereja.

Sebaliknya pengelolaan keuangan yang tidak baik dapat menimbulkan konflik dalam gereja. Beberapa kasus mengenai kegagalan gereja dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan telah telah terpublikasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pendeta dan administrasi diosesan Gereja Katolik yang telah melakukan penggelapan dana Gereja sebesar US\$ 3,5 juta dalam kurun waktu tiga tahun (Fialka, 1995). Kasus lain terjadi pada Gereja Episkopat Pusat New York, penyalahgunaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Ellen Cook, mantan bendahara yang menggelapkan dana sebesar US\$ 2,2 juta antara tahun 1990-1995. Hal ini terjadi karena adanya kewenangan yang sangat dominan (Duncan, *et al.* 1999). Skandal keuangan akibat kurangnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terjadi pula di Indonesia, seperti halnya yang dialami oleh GPIB Maranatha Denpasar, dimana seorang kasir gereja telah melakukan kasus penggelapan uang milik jemaat (<https://baliportalnews.com/>, diakses pada 26 November 2021). Warga jemaat Gereja Silo Protestan Maluku di Desa Romean, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menengarai mantan Bendahara Panitia Pembangunan Gedung Gereja Silo Jemaat GPM Romean telah menyalahgunakan sumbangan masyarakat bagi gereja, untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai calon legislatif (<http://www.beritamalukuonline.com/>, diakses 26 pada November 2021). Sementara di Gereja Bethany Surabaya terjadi kasus penggelapan aset jemaat, pencucian uang (*money laundry*) sebesar 4,7 triliun rupiah, serta adanya dugaan pemalsuan akte pendirian gereja, yang diduga kuat dilakukan gembala

sidang gereja. Beberapa kasus tersebut merupakan contoh timbulnya permasalahan pengelolaan keuangan gereja, akibat kurangnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Akuntabilitas gereja merupakan bagian dari akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana publik menggunakan dimensi *value for money*. Mahmudi (2015) menyatakan bahwa *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang, yang merupakan konsep dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja *value for money* dimana diukur dari nilai ekonomi, efektivitas, serta efisiensi. Indikator ekonomi diukur dengan satuan moneter dari sumber daya yang dipilih untuk digunakan, indikator efisiensi diukur dari output yang dihasilkan, serta efektivitas diukur dari pencapaian tujuan. Merujuk pada pemahaman tersebut, maka akuntabilitas keuangan gereja tidak hanya menyangkut soal dana, namun juga terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap program dan kebijakan yang disusun oleh penatalayan gereja bersama dengan jemaat.

Penerapan akuntabilitas di gereja dipandang dari dua sisi yaitu akuntabilitas horizontal dan vertikal. Pemahaman akuntabilitas publik dalam organisasi gereja menurut Sukmawati (2016) adalah bahwa dalam organisasi gereja, pertanggungjawaban kepada Tuhan adalah suatu bentuk akuntabilitas vertikal. Sedangkan, pertanggungjawaban kepada sesama umat manusia dalam hal ini ialah jemaat serta pengurus merupakan suatu bentuk akuntabilitas horizontal. Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Betlehem Untal-Untal merupakan salah satu gereja di bawah naungan Sinode GKPB. GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal merupakan gereja yang mengatur, mengembangkan, dan membiayai organisasinya berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKPB, serta Tata Gereja GKPB.

Awal tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan mewabahnya virus COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Gereja sebagai wadah persekutuan jemaat sebagai anggota masyarakat juga tak luput dari perubahan akibat pandemi COVID-19. Selaku organisasi gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, per tanggal 22 Maret 2021, GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal tunduk pada himbuan pemerintah, dengan tidak menyelenggarakan tata peribadahan di gedung gereja, melainkan menyediakan fasilitas bagi jemaat agar dapat melaksanakan ibadahnya dari rumah. Ketaatan gereja terhadap himbuan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas gereja dalam dimensi ekologi serta sosial, dalam hal ini gereja memiliki peran dalam menjaga lingkungan serta melindungi masyarakat agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Selain itu, penurunan dalam aspek perekonomian jemaat juga sebagai salah satu dampak dari pandemi ini sehingga berdampak pula terhadap pendapatan keuangan persembahan di jemaat. Data terkait penurunan penerimaan tersebut disajikan dalam tabel tersebut dapat dilihat pada Laporan Konsolidasi Jemaat dan Lembaga Kategorial GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal tahun 2018-2020, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Penerimaan GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal Tahun 2018-2020

No.	Sumber Penerimaan	Tahun 2018 (dalam Rp)	Tahun 2019 (dalam Rp)	Tahun 2020 (dalam Rp)
1	Sektor Kolekta	218.036.100	231.363.700	167.181.500
2	Sektor Persembahan	373.183.100	421.584.198	212.854.800
3	Sektor Hasil Usaha	63.809.290	80.946.289	21.145.844
4	Sektor Bantuan Program	82.349.444	55.057.000	167.876.412
5	Sektor Hutang/Piutang	36.627.122	4.525.930	51.457.843
Total Penerimaan tiap Tahun		774.005.056	793.477.117	620.516.399

Sumber: Laporan Rapat Jemaat GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal tahun 2018-2020

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, berdampak kepada penyelenggaraan kegiatan atau program gereja yang harus melibatkan banyak orang, sehingga sebagian besar program greja yang direncanakan pada tahun 2020, tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga berdampak terhadap keterserapan anggaran gereja, sehingga Pendeta bersama seluruh jajaran penatalayan jemaat memutuskan melakukan alih alokasi anggaran. Seluruh anggaran yang tidak bisa dialokasikan dalam bentuk kegiatan berjemaat, dialihkan fungsinya untuk penanganan atau penanggulangan dampak

COVID-19 bagi jemaat. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas gereja terhadap pengelolaan dana jemaat, untuk memberikan pelayanan kepada jemaat dalam situasi tanggap darurat COVID-19, gereja ingin memastikan supaya jemaat tetap terjamin keimanannya dan tetap terpeliharakan kehidupan jasmaninya di tengah situasi sulit selama pandemi.

Penelitian ini mengadopsi *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar untuk memahami makna dibalik pengalaman para penatalayan jemaat dalam membuat keputusan terkait penerapan akuntabilitas gereja di tengah situasi masa pandemi. Peneliti ingin melihat niat penatalayan jemaat dalam mengambil keputusan melaksanakan alih alokasi anggaran selama pandemic COVID-19 sebagai bentuk akuntabilitas gereja terhadap jemaat. Niat untuk melakukan perilaku (*intention*) merupakan komponen diri seseorang yang menunjukkan seberapa kuat keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* dikenal yang namanya *attitude towards the behavior* (sikap terhadap perilaku) cenderung kepada pertimbangan sikap seseorang, yaitu keyakinan seseorang untuk mengevaluasi positif dan negatif suatu perilaku. *Subjective norm* (norma subjektif) dimana keyakinan seseorang yang merupakan suatu hasil dari pengaruh pihak lain yang didasarkan atas harapan normatif yang akan mempengaruhi cara berperilaku seseorang. *Perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsi) yaitu keyakinan seseorang tentang adanya hal yang mendukung atau menghambat seseorang untuk berperilaku tertentu, dan seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung atau menghambat tindakan seseorang untuk berperilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsi (*perceived behavioral control*) adalah kemudahan atau kesulitan untuk melakukan persepsi (Ajzen, 1985). Berdasarkan konsep yang terkandung dalam *Theory of Planned Behavior*, teori ini dipandang cocok untuk memperoleh pemahaman atas pemaknaan akuntabilitas oleh penatalayan jemaat.

Beberapa studi yang mengulas mengenai akuntabilitas gereja telah dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh Wijaya *et al.* (2020), hasil studi ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Studi oleh Prabowo dan Kurniasih (2019) menyatakan bahwa gereja telah melakukan penerapan akuntansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa kekurangan yaitu pelaporan yang tidak sesuai dengan PSAK 45, karyawan yang tidak kompeten, dan belum ada pembagian kerja yang baik. Studi lain oleh Pramesti dkk. (2018) menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas keuangan di gereja sudah cukup dan pengendalian internal relatif longgar tetapi tidak menimbulkan kecurangan. Praktik akuntabilitas di gereja dimana konsep pengelolaan keuangan didasarkan pada konsep teologi dan dikelola secara profesional (Dewi dkk, 2015). Dari hasil telaah studi terdahulu, penulis memandang bahwa studi keperilakuan tentang penerapan akuntabilitas gereja masih sedikit dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan akuntabilitas dari sisi keperilakuan, melalui kajian mendalam yang berfokus pada upaya menggali dan menginterpretasi pemaknaan para pelaku peristiwa yang memiliki pengalaman dalam penerapan akuntabilitas pada sebuah organisasi nonlaba keagamaan, khususnya organisasi gereja.

Fenomena yang terjadi sebagai dampak COVID-19 terhadap GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal, menarik peneliti untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana makna akuntabilitas gereja dari pengalaman penatalayan jemaat. Penelitian ini mengungkap realitas dibalik fenomena yang terjadi pada GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moelong (2014), pendekatan fenomenologi meyakini bahwa kesadaran terbentuk dari pengalaman sehari-hari, pendekatan ini akan memberikan pandangan berpikir yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia serta interpretasi manusia atas dunia. Komalasari dkk. (2019) menyatakan bahwa fenomenologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi dalam keseharian mereka secara utuh, terperinci, mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Konsep utama dalam pendekatan fenomenologi adalah makna yang merupakan hasil dari pengalaman kesadaran manusia (Smith *et al.*, 2009). Kita bisa memperoleh pembelajaran dari makna pengalaman seseorang, karena tindakan yang dilakukan seseorang merupakan hasil pemaknaan terhadap tindakan tersebut. Melalui pendekatan fenomenologi, kita akan mendapatkan jawaban mengenai makna tentang suatu fenomena yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui pemaknaan akuntabilitas gereja dalam masa pandemi COVID-19. Dari uraian tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah Akuntabilitas pada Organisasi Berorientasi Nonlaba Gereja di Masa Pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu fenomenologi. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman atas fenomena yang terjadi dan bagaimana subjek penelitian dalam memaknai fenomena tersebut (Cresswell, 2007). Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian pada GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal yang bertempat di Banjar Untal-Untal, Desa Dalung. Alasan pemilihan situs ini seperti yang disampaikan pada latar belakang yaitu adanya keingintahuan peneliti untuk melihat makna penerapan akuntabilitas gereja dalam masa pandemi COVID-19 terkait fenomena yang terjadi di dalamnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, serta data sekunder melalui sumber dokumen-dokumen seperti Alkitab, Tata Gereja Kristen Protestan di Bali, laporan pelaksanaan program pelayanan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja gereja, laporan keuangan jemaat serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menentukan sampel dengan melakukan pemilihan informan yang terbagi menjadi tiga yaitu: informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) dalam menggali pemaknaan partisipan tentang objek atau peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dalam bentuk informasi yang memadai terkait pengelolaan sumber daya yang diberikan untuk mencapai tujuan bersama. Akuntabilitas gereja menurut Sukmawati (2016), terbagi menjadi dua jenis yakni pertanggungjawaban kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal) serta pertanggungjawab sesama umat manusia dalam hal ini ialah jemaat (akuntabilitas horizontal). Gereja wajib mempertanggungjawabkan dana yang digunakan oleh gereja dalam aktivitas operasionalnya, yang diperoleh dari sumbangan dan pihak lain yang tidak mengharap imbalan secara transparan.

Di masa pandemi gereja dihadapkan dalam suatu dilema terkait keputusan alih alokasi anggaran dimana pengambilan keputusan itu melibatkan Pendeta, Bendahara Jemaat dan Bendahara Lembaga Kategorial Persekutuan yang dalam penelitian ini bertindak sebagai informan. Perbedaan perspektif dan pemahaman masing-masing informan terhadap pengalaman yang berkaitan tentang bagaimana perasaan informan saat dan setelah membuat keputusan tersebut serta tujuan yang melatarbelakangi pembuatan keputusan tersebut.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga informan yaitu: (P1) Informan Edi selaku pendeta di GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal dengan periode pelayanan 2020-2024; (P2) Informan Made selaku anggota majelis jemaat yang ditugaskan untuk mengelola keuangan sebagai bendahara GKPB Jemaat Betlehem Untal-Untal; serta (P3) Informan Komang selaku Pengurus Lembaga Kategorial Persekutuan Bapak-Bapak, yang menangani bidang keuangan sebagai bendahara lembaga. Adapun peneliti mengidentifikasi penelitian ini dalam bentuk tema-tema dari hasil proses wawancara dengan seluruh informan berkaitan dengan pengalamannya menerapkan akuntabilitas gereja pada masa pandemi terdiri dari: a) Sikap terhadap alih alokasi anggaran; b) Norma subjektif; c) Persepsi kontrol perilaku.

Peneliti menyajikan matrik tema yang memuat esensi pemaknaan pengalaman ketiga informan dalam pengambilan keputusan alih alokasi anggaran. Tema umum pertama berkaitan dengan aspek sikap positif, kedua tentang norma subjektif dan ketiga tentang persepsi kontrol perilaku. Dari tema-tema yang muncul dan *significant statement* yang diungkapkan informan, ketiga informan memiliki *state of emotion* bernada positif.

Tabel 2.
Matriks Tema

Informan	Informan Edi	Informan Made	Informan Komang
Tema Umum			
Sikap Positif	Penanganan dampak pandemi untuk jemaat -	Maksimalisasi fungsi anggaran Menjaga kepercayaan -	Penanganan dampak pandemi untuk jemaat -
Norma Subjektif	Dukungan Pengelola Pelayanan Dukungan Jemaat	Dukungan Pengelola Pelayanan -	Dukungan Pengelola Pelayanan -
Persepsi Perilaku	Kontrol Kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan gereja -	Kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan gereja -	Kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan gereja Pemahaman tentang kondisi keuangan
	Kondisi darurat	Ketersediaan dana	Ketersediaan dana

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

Sikap terhadap alih alokasi anggaran, yang dicerminkan dari keyakinan informan mengenai manfaat alih alokasi anggaran diperoleh dari pengamatan informan mengenai kondisi jemaat. Sub keyakinan informan mengenai manfaat alih alokasi anggaran diperoleh dari ungkapan informan Edi yang menggambarkan pemahamannya tentang manfaat alih alokasi anggaran yakni keputusan alih alokasi anggaran dapat bermanfaat memelihara umat dimana menurutnya melalui alih alokasi anggaran ini akan bermanfaat terhadap rasa aman dan nyaman yang dirasakan serta inisiatif jemaat untuk saling membantu satu dan yang lainnya. Interaksi antara kekuatan keyakinan individu dan hasil evaluasi terhadap manfaat dari alih alokasi anggaran tersebut menunjukkan informan memiliki sikap mendukung untuk membuat keputusan alih alokasi anggaran tersebut. Bagaimana agar umat tenang dan sejahtera di rumah. Untuk tenang di rumah, pastikan dia dijamin sejahtera. Poin anggaran tadi kita jadikan semacam tatanan bagaimana umat tetap diam di rumah dengan aman dengan proses dijalankan, sarana proses dijamin. Lalu agar tetap mengepul asap didapur itu, diadakanlah aksi peduli kasih. (Informan Edi)

Sedangkan menurut informan Made meyakini bahwa alih alokasi anggaran menghasilkan manfaat untuk memaksimalkan fungsi dan ketersediaan anggaran mengingat bahwa kegiatan yang telah dianggarkan tidak dapat direalisasikan, sehingga anggaran dari program kegiatan tersebut tidak ada alokasinya pada tahun berjalan dan perlu adanya alih alokasi anggaran. Diperkuat dengan evaluasi informan Made dimana keputusan alih alokasi anggaran dapat memberikan berbagai keuntungan diantaranya: a) meningkatkan kinerja pelayanan bidang multimedia untuk tetap melayani di masa pandemi, b) membantu kondisi jemaat yang terdampak pandemi khususnya secara spiritual, dan c) penatalayan mendapatkan kepercayaan. Selama pandemi, kita melakukan alih alokasi dana program untuk mengcover pengeluaran dalam bidang persekutuan untuk tim multimedia, dan untuk berbagi kasih kepada jemaat dan lingkungan sekitar, dan selain kita menggunakan dana atau anggaran yang ada, banyak juga donatur yang memberikan sumbangan. (Informan Made).

Informan Komang meyakini bahwa keputusan alih alokasi anggaran dapat membantu jemaat baik dari sisi ekonomi, seperti yang terlihat dari ungkapan informan Komang berikut ini: Pastinya anggaran terserap untuk kepentingan pelayanan jemaat, hanya saja bentuk programnya berbeda. Saya mendengar bahwa jemaat sangat terbantu dengan keputusan yang diambil. Paling tidak, jemaat bisa tercukupi kebutuhan pokoknya. (Informan Komang).

Theory Planned Behavior menjelaskan tentang sikap seseorang ditentukan atas manfaat atau hasil dari suatu perilaku. Seseorang akan memiliki sikap positif akan suatu perilaku apabila mereka meyakini perilaku tersebut akan memberikan dampak yang positif, begitupun sebaliknya (Ajzen, 2005). Interaksi antara kekuatan keyakinan informan mengenai manfaat dari keputusan alih alokasi anggaran dengan hasil evaluasi terhadap manfaat tersebut menunjukkan informan memiliki sikap positif dan niat untuk membuat keputusan alih alokasi anggaran.

Norma subjektif atau pengaruh orang-orang terdekat terhadap keputusan alih alokasi anggaran merupakan tema yang muncul dari informan Edi, Made dan Komang. Sederhananya norma subjektif merupakan pertimbangan subjektif pihak lain secara tidak langsung akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan seseorang. Tema norma subjektif yang muncul diperoleh dari 2 (dua) sub tema yaitu: a) Keyakinan individu akibat pengaruh orang sekitar dan b) Motivasi individu untuk mematuhi harapan dari orang sekitar. Sub tema keyakinan individu akibat pengaruh orang sekitarnya diperoleh dari dukungan majelis dan pengurus kategorial. Selaras dengan pernyataan (Ajzen, 1991), bahwa norma subjektif merupakan keyakinan seseorang yang merupakan suatu hasil dari pengaruh pihak lain yang didasarkan atas harapan normatif yang akan mempengaruhi cara berperilaku seseorang. Dalam hal ini pengambilan keputusan untuk menyetujui atau tidak alih alokasi anggaran dipengaruhi oleh individu lain atau kelompok. Keyakinan individu akibat pengaruh orang sekitarnya diungkapkan Edi dalam pernyataan berikut ini: Saat mengambil keputusan merealokasi anggaran, saya melibatkan majelis dan semua pihak, semua pengurus kategorial diingatkan agar ikut berpartisipasi dalam lumbung berbagi kasih itu. Kita ambil langkah-langkah itu. (Informan Edi).

Norma subjektif mengenai pembuatan keputusan alih alokasi anggaran semakin kuat karena berinteraksi dengan motivasi individu untuk memenuhi harapan harapan dari orang sekitar. Pembuatan keputusan alih alokasi anggaran dimotivasi dukungan yang dari diperoleh dari dua kategori, yaitu jemaat yang memiliki kemampuan lebih serta dukungan dari tim dan *partner* pelayanan. Kepercayaan jemaat terhadap Edi timbul karena Edi dan seluruh jajaran penatalayan menyampaikan rencana program tersebut dengan jujur, terbuka dan penuh kasih. Adanya dukungan majelis dan lembaga kategorial serta motivasi dari jemaat yang ikut berpartisipasi mempengaruhi niat informan Edi untuk mengambil keputusan alih alokasi anggaran. Makin besar pengaruh norma-norma subyektif mendukung keputusannya, maka makin kuat niat untuk membuat keputusan alih alokasi anggaran.

Informan Made mengungkapkan bahwa keyakinannya dalam pembuatan keputusan alih alokasi anggaran merupakan pertimbangan dari pendeta. Namun, keputusan informan Made dalam melakukan alih alokasi anggaran adalah adanya kesepakatan dari jajaran majelis jemaat. Norma subjektif ini semakin kuat ditambah dengan adanya motivasi individu untuk memenuhi harapan orang sekitarnya. Pak Pendeta meminta pertimbangan majelis bagaimana kalau dana dari kegiatan operasional yang tidak dapat berjalan dialihkan untuk mengelola ibadah secara *online*, dan untuk membantu memulihkan ekonomi jemaat. Setelah seluruh majelis *oke* (setuju), baru mengundang lembaga kategorial dan non kategorial untuk membahas rencana tersebut. Lembaga juga dihimbau agar dapat berpartisipasi mengalokasikan dana programnya untuk aksi berbagi kasih. (Informan Made)

Interaksi antar individu juga dalam diidentifikasi dalam bentuk hubungan vertikal maupun horizontal dimana interaksi antar individu yang memiliki kedudukan yang berbeda tingkat atau status dikatakan sebagai hubungan vertikal, sementara hubungan antara individu yang bersifat setara dikategorikan sebagai hubungan horizontal. Pola hubungan ini dapat menjadi sumber perbedaan persepsi. Dalam kondisi yang dialami oleh informan Made, pola hubungan tersebut bersifat vertikal, yaitu antara pendeta dan majelis jemaat atau bendahara sehingga harapan normatif akan menimbulkan suatu dilema kepatuhan terhadap harapan tersebut atau tidak dalam berperilaku atau mengambil keputusan (Ramdhani, 2011). Namun, berdasarkan pernyataan Made di atas, keputusan alih alokasi anggaran merupakan keputusan yang telah disepakati bersama oleh majelis tanpa adanya tekanan dari pendeta jemaat, melainkan adanya motivasi untuk bersama-sama untuk mengambil sikap dalam melayani jemaat.

Informan Komang berpendapat bahwa keyakinan individu akibat pengaruh orang sekitarnya diperoleh diperoleh dari dua kategori yaitu keyakinan jemaat perlu dibantu serta keyakinan akan dukungan pengurus. Norma subjektif ini semakin kuat ditambah dengan adanya motivasi individu untuk memenuhi harapan orang sekitar yang diperoleh dari dua kategori yaitu Respon positif pengurus dan dukungan pendeta. Saya mencoba mendiskusikan pertimbangan tersebut bersama pengurus inti terlebih dahulu, dengan ketua dan sekretaris. Mereka mendukung ide tersebut. Dalam rapat koordinasi pengurus persekutuan kaum Bapak, hal tersebut juga direspon baik oleh pengurus yang lain. (Informan Komang).

Persepsi kontrol perilaku adalah tema yang muncul dari informan Edi, Made dan Komang. Ketersediaan sumberdaya (peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan) yang memadai atau tidak dalam mewujudkan perilaku tersebut adalah suatu konsep dari persepsi kontrol perilaku. Semakin memadai keyakinan atas tersedianya sumberdaya yang dimiliki untuk menjalankan suatu perilaku maka semakin besar pula pengaruh dari persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Keyakinan terdapat faktor pendukung yang memudahkan untuk melakukan alih alokasi anggaran adalah kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan gereja, pemahaman tentang kondisi keuangan, ketersediaan dana serta kesempatan yang muncul sebagai dampak kondisi darurat pandemi. Hubungan yang linier antara ketersediaan suatu sumber daya yang dimiliki oleh individu terhadap tingkat persepsi kontrol yang mereka miliki.

Berdasarkan tema atas persepsi kontrol tersebut diidentifikasi sub-tema yaitu keyakinan terhadap ketersediaan sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki yang mendukung atau menghambat perilaku (*control belief strength*) serta besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam merealisasikan keputusan alih alokasi anggaran. Keyakinan terhadap ketersediaan sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki yaitu kesadaran akan peran informan Edi sebagai pemimpin umat. Sub tema besarnya peran sumber daya dalam mewujudkan keputusan tersebut terbagi dalam tiga kategori yang terdiri dari: a) Ketersediaan dana; b) Kondisi darurat; dan c) Tupoksi sebagai pengelola. Keyakinan informan Edi mengenai ketersediaan sumber daya yang menjadi faktor pendukung dalam membuat keputusan alih alokasi anggaran. Sehingga semua fokusnya adalah pastikan umat tetap tenang aman dalam kesejahteraan yang terlayani secara utuh, jadi *touch* itu penting dalam masa sukar selama pandemi, agar tidak ada jemaat yang merasa tertinggal. Sebagai pengambil kebijakan, saya bertanggungjawab. Monitoringsnya melalui satgas covid, suka duka, lembaga yang lain. (Informan Edi)

Informan Edi memiliki keyakinan terhadap kesanggupannya membuat alih alokasi anggaran sebagai, karena perannya sebagai pengambil kebijakan, garda terdepan pemimpin umat dan pihak yang wajib bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan jemaat dalam masa sukar selama pandemi. Selain dari keyakinan sumber daya yang dimiliki informan, menurut informan ketersediaan dana, kondisi darurat, dan tupoksi sebagai pengelola akan sangat mendorong untuk terbentuknya perilaku. Sumber daya dan peran yang dimiliki informan akan sangat membantu dalam pertimbangannya membuat keputusan alih alokasi anggaran. Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki individu terkait dengan perilaku tertentu, semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut.

Ajzen (2005) menyatakan hubungan yang linier antara ketersediaan suatu sumber daya yang dimiliki oleh individu terhadap tingkat persepsi kontrol yang mereka miliki sehingga melalui hubungan tersebut yang kemudian akan berdampak pada tingkat keyakinan individu dalam menghadapi kesulitan. Keyakinan terhadap ketersediaan sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki oleh informan Made adalah kesadaran akan perannya sebagai pengelola pelayanan melalui ungkapan informan yang menyatakan bahwa terdapat faktor pendukung yang memudahkan informan dalam pembuatan keputusan alih alokasi anggaran. Faktor-faktor pendukung yang dirasakan informan Made dapat digambarkan melalui ungkapan informan berikut ini: Pak Pendeta menyampaikan ke majelis, bahwa selaku pengelola pelayanan, kami harus memperhatikan kesulitan yang dialami oleh jemaat, perlu adanya fasilitas agar jemaat tetap terpelihara iman dan ekonominya, sehingga Pak Pendeta meminta pertimbangan majelis bagaimana kalau dana dari kegiatan operasional yang tidak dapat berjalan dialihkan untuk mengelola ibadah secara *online*, dan untuk membantu memulihkan ekonomi jemaat. (Informan Made).

Informan Made yakin bahwa perannya sebagai pengelola keuangan gereja akan memudahkan jalan untuk melakukan alih alokasi anggaran. Selain kesadaran akan perannya sebagai penatalayan jemaat, informan melihat bahwa gereja memiliki sumber daya berupa dana operasional yang tidak terpakai selama pandemi, hal tersebut menambah keyakinan informan Made bahwa keputusan alih alokasi anggaran ini akan dapat dilakukan selama masa pandemi. Sejalan dengan informan Edi serta Made, informan Komang memaknai keyakinan terhadap ketersediaan sumberdaya diperoleh dari dua kategori yaitu kesadaran akan peran sebagai pengurus dan pemahaman terhadap posisi keuangan lembaga. Selain kesadaran akan perannya sebagai penatalayan jemaat, informan melihat bahwa gereja

memiliki sumber daya berupa ketersediaan dana dari anggaran program yang tidak dapat terlaksana selama pandemi, hal tersebut menambah keyakinan informan Komang bahwa keputusan alih alokasi anggaran ini akan dapat dilakukan selama masa pandemi.

Dari tema-tema yang muncul dan *significant statement* yang diungkapkan informan, ketiga informan memiliki *state of emotion* bernada positif. Pengalaman pengambilan keputusan alih alokasi anggaran dimaknai informan Edi sebagai sebuah kebanggaan. Rasa bangga yang muncul karena informan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memelihara kondisi spiritual, mental serta material jemaat ditengah kondisi pandemi secara akuntabel dan transparan. Perasaan bangga informan Edi juga didukung oleh berbagai situasi dan kondisi atau kejadian yang muncul dalam proses pengambilan keputusan, meliputi adanya ketersediaan sumber daya dan kompetensi yang memadai (persepsi perilaku kontrol), dan dukungan dari *partner* pelayanan bahkan juga jemaat selaku *stakeholder* gereja (norma subjektif) yang menghadirkan rasa syukur dan percaya diri dalam mengambil keputusan.

Informan Made memiliki *state of emotion* berupa perasaan senang. Rasa senang muncul karena informan Made mendapatkan dukungan dan masukan dari pendeta, dan rekan-rekan penatalayan (norma subjektif) ketika melakukan koordinasi terkait permasalahan yang dialami gereja dalam masa pandemi. Kepercayaan dari jemaat terkait pengambilan keputusan informan juga memunculkan sikap yakin/optimis dari pelaku pengambil keputusan. Seperti halnya yang ditemukan pada informan Edi, *state of emotion* yang dirasakan Informan Komang yaitu berupa perasaan bangga dan senang. Rasa bangga karena apa yang menjadi pertimbangan informan Komang untuk mengambil keputusan ternyata didukung oleh sesama para penatalayan. Rasa senang timbul karena informan ikut dilibatkan dalam pembuatan keputusan penting yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh jemaat yang dilayani.

Sikap senang dan bangga sebagaimana yang dirasakan oleh informan-informan tersebut merupakan suatu bentuk sikap positif terhadap penerapan akuntabilitas melalui keputusan alih alokasi anggaran, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang telah didiskusikan merupakan faktor yang memotivasi informan dalam pengambilan keputusan alih alokasi anggaran. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku, diasumsikan sebagai niat (Ajzen, 1991). Hal ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma-norma subjektif (*subjective norms*), dan satu faktor tambahan yang menentukan intensi perilaku yaitu persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana para pelaku pengambil keputusan memaknai pengalamannya dalam menerapkan akuntabilitas gereja di masa pandemi dalam bentuk pengambilan keputusan alih alokasi anggaran. Penelitian ini menemukan tiga tema yang muncul dalam pemaknaan informan, yaitu: a) Sikap Positif; b) Norma Subjektif; dan c) Persepsi Kontrol Perilaku yang menjadi faktor pendorong informan dalam mengambil keputusan alih alokasi anggaran sebagai penerapan akuntabilitas gereja di masa pandemi. Dari kemunculan tema-tema serta *significant statement* yang diungkapkan oleh informan, ketiga informan memiliki *state of emotion* bernada positif berupa perasaan syukur, bangga dan senang karena keputusan untuk melakukan alih alokasi anggaran berhasil membuat tujuan gereja untuk memelihara umat secara spiritual, mental dan material dapat tercapai, dan kepercayaan jemaat terhadap penatalayan gereja terjaga.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dimana dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian serupa. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya pengalaman serta kemampuan peneliti untuk dapat mengeksplorasi, menginterpretasikan serta menuliskan sebuah realitas sosial, sehingga peneliti sangat terbatas menemukan aspek lain yang mendasari perilaku pengambilan keputusan. Selain itu, subjektivitas peneliti juga masih mewarnai dalam interpretasi makna dari informan sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digunakan untuk

melakukan generalisasi. Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan sesuai hasil penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya dipandang perlu untuk mengeksplorasi dimensi lain dalam kajian perilaku terkait penerapan akuntabilitas.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Actions : A Theory of Planned Behavior*. New York: Springer.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). Attitudes Personality and Behaviour. *International Journal of Strategic Innovative Marketing*, Vol. 3, p. 117.
- Baliportalnews.com. (22 Oktober 2021). Terdakwa Pengelapan Dana Gereja GPIB Denpasar Dipenjara Dua Tahun. Diakses pada 26 November 2021, dari <https://baliportalnews.com/2021/10/terdakwa-penggelapan-dana-gereja-gpib-denpasar-dipenjara-dua-tahun/>
- Beritamaluonline.com. (5 Mei 2015). Mantan Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Rومان Sengaja Berkelit Soal Penyalahgunaan Rp 300an Juta. Diakses pada 26 November 2021, dari <http://www.beritamaluonline.com/2015/05/mantan-bendahara-panitia-pembangunan.html>
- Cresswell. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Second Edition. New Delhi: SAGE Publication.
- Dewi, Atmadja, dan Adiputra. (2015). Konsep Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Distrik Jawa Timur dan Bali), *e-Journal SI*. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Volume 3(1).
- Duncan, J.B., D.L. Flesher, and M.H. Stocks. (1999). Internal Control Systems in US Churches: An Examination of The Effects of Church Size and Denomination on Systems of Internal Control. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 12 (2): 142 – 164. USA: MCB UPLtd.
- Fialka, J.J. (1995). Unholy Acts: Church Officials' Thefts Dismay Catholics'. *Wall Street Journal*, 27 June: B1-B2.
- Komalasari dkk. (2019). Akuntabilitas Akuntan Perempuan-Karir Bali: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1): 70-85.
- Kompas.com. (11 Maret 2013). Dugaan Korupsi Dana Gereja Rp 4,7 Triliun, Jemaat Saling Laporkan. Diakses pada 26 November 2021, dari <https://regional.kompas.com/read/2013/03/11/19424221/~Regional~Jawa>.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munte, M., & Dongoran, D. (2019). Impact of Transparency and Accountability of Church Financial Reporting on the Interest of Members' Church Giving Donations to Church. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3439838>
- Prabowo dan Kurniasih. (2019). Penerapan Akuntansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal pada Gereja Kristen Jawa Wedi. *Equity*, Vol. 20(2).
- Pramesti, A., Riyandini, E.C., Pesudo, D.A.A. (2018). Akuntabilitas dan Pengendalian Internal pada Organisasi Nirlaba (Studi Pada GBI Ambarawa). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11557>
- Smith, Jonathan A, Flowers, Paul, and Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory Method and Research*. London: Sage Publications.
- Sukmawati, Pujiningsih dan Laily. (2016). Akuntabilitas Gereja Dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory (Studi Kasus Pada Gereja X Di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3(4):301–310.
- Wijaya dkk. (2020). Konsep Akuntabilitas dalam Gereja Katolik. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol 19(2).